

**PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
PEMBANGUNAN DI KELURAHAN PAALDUA
KECAMATAN PAAL DUA KOTA MANADO**

*Juita Lidya Tiwa¹
Ronny Gosal²
Alfon Kimbat³*

Abstrak

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan suatu lembaga yang menjadi mitra pemerintah kelurahan/desa dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan, namun pada kenyataannya keberadaan LPM di Kelurahan Paaldua belum melaksanakan fungsi sebagaimana mestinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran LPM Kelurahan Paaldua dalam pembangunan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Paal Dua belum optimal berperan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan, hal ini dapat dinilai dari rendahnya kemampuan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Paal Dua dalam merencanakan pembangunan, kemampuan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat, dan kemampuan untuk melaksanakan, mengevaluasi kegiatan pembangunan yang ada di Kelurahan. Rendahnya peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Paal Dua ini disebabkan oleh: keaktifan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Paal Dua itu sendiri, dimana ada beberapa pengurus yang sudah tidak lagi berdomisili di Kelurahan Paal Dua, ditambah dengan rendahnya pengetahuan, keterampilan, keahlian sesuai dengan pekerjaan yang diembannya, motivasi pengurus, serta permasalahan klasik yaitu tidak tersedianya dana operasional bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Paal Dua

Kata Kunci : Peran, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan.

¹*Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat.*

²*Ketua Penguji/Pembimbing Skripsi.*

³*Sekretaris Penguji/Pembimbing Skripsi*

Pendahuluan

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dipakai sebagai pengganti nama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), yang dideklarasikan pada tanggal 21 Juli 2000 melalui forum Musyawarah Temu LKMD Tingkat Nasional di Bandung yang diikuti oleh para utusan LKMD se-Indonesia. Peserta hadir dengan membawa mandat penuh dari provinsinya masing-masing untuk mempelajari, menelaah dan membuat kesepakatan-kesepakatan nasional tentang keberadaan lembaga sosial kemasyarakatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di desa/kelurahan. Dalam forum musyawarah temu LKMD tingkat nasional tersebut akhirnya terjadi kesepakatan Nasional yang dikenal dengan “Deklarasi Bandung” memuat 2 (dua) hal yang sangat fundamental yakni:

1. Merubah nama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan (LKMD/K) menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
2. Terbentuknya Asosiasi LPM secara nasional dengan diawali terbentuknya Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LPM.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) adalah Lembaga Kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat desa, merupakan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat desa, yang bertujuan untuk meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan

pengendali pembangunan, meningkatnya kemampuan masyarakat sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengola dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) terutama dalam bidang agrobisnis dan pariwisata, Meningkatnya ekonomi kerakyatan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dalam pembangunan desa/kelurahan LPMD/K merupakan mitra kerja dari pemerintah desa/kelurahan. Pemerintah desa/kelurahan adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa/kelurahan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang mempunyai peran penting dalam pembangunan desa. Kepala desa/lurah mempunyai kedudukan sebagai pimpinan Pemerintah Desa/kelurahan dan unsur penyelenggara pemerintahan desa/kelurahan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Masalah yang mendesak untuk diselesaikan adalah bagaimana membangun kelurahan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, termasuk sumber daya manusia sehingga bermanfaat bagi kelurahan. Upaya yang penting untuk dilakukan agar masyarakat Kelurahan mampu bertanggung jawab dan mengelola sumberdaya yang dimiliki adalah penumbuhan kapasitas organisasi lokal agar dapat menentukan kebutuhan, tujuan dan aspirasi serta mengambil kebutuhan yang berdampak pada peningkatan kondisi hidupnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi: penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat; penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; peningkatan

kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat; penyusun rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif; penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup; pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja; pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat. Keberadaan organisasi lokal seperti LPM ini sangat diperlukan untuk menghindari eksekusi negatif dari pembangunan yang dilaksanakan secara top down. LPM juga merupakan lembaga otonomi di kelurahan yang diberi kewenangan oleh masyarakat untuk merumuskan kebutuhannya sesuai dengan potensi yang dimiliki. Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001, misi utama pembentukan LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa di bidang pembangunan. Keberadaan organisasi LPM akan dirasakan oleh masyarakat apabila, pengurus LPM dapat melaksanakan tugas pokoknya sehingga memberikan manfaat nyata bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Adapun yang menjadi tugas pokok LPM adalah (1) menyusun rencana pembangunan yang partisipatif, (2) menggerakkan swadaya gotong-royong

masyarakat, (3) melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Hasil pengamatan awal yang dilakukan, ditemukan beberapa hal yang menunjukkan bahwa LPM sebagai lembaga kemasyarakatan yang ada di Kelurahan Paal Dua belum dapat menunjukkan perannya sebagai lembaga yang menjadi mitra pemerintah kelurahan dalam proses pelaksanaan pembangunan kelurahan. Peran LPM dalam proses pembangunan merupakan faktor sentral yang mengatur semua sarana dan prasarana di kelurahan. Posisi strategis LPM hanya akan dapat dirasakan oleh masyarakat apabila wadah tersebut dapat melaksanakan tugas pokoknya sehingga memberikan manfaat nyata bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat di kelurahan. Rendahnya tingkat kemajuan LPM ditandai oleh kurang aktifnya warga masyarakat dalam wadah organisasi tersebut baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan program-program pembangunan, oleh karena itu dengan lemahnya peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang ada, mengakibatkan kurangnya peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam melakukan kegiatan pemberdayaan di masyarakat kelurahan Paal Dua. Berdasarkan uraian masalah dalam penelitian ini, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam pembangunan di Kelurahan Paal Dua? Tujuan utama penelitian ini adalah mengetahui peran LPM dalam pembangunan di Kelurahan Paal Dua.

Tinjauan Pustaka

Menurut Soekanto (2003:65), peran adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia

menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki macam-macam peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidup. Hal ini sekaligus berarti bahwa peran menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang akan diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan satu peran. Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peranan didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peranan yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peranan-peranan tersebut. Peran mencakup tiga hal yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat dalam organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau disingkat LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dan pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. LPM merupakan lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dan pemerintah kelurahan (Keppres No. 49 Tahun 2001). Tujuan dibentuknya LPM adalah

sebagai mitra pemerintah desa dan pemerintah kelurahan di bidang pembangunan (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan tindak lanjut) dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Kedudukan LPM baik di desa maupun di kelurahan bersifat lokal dan secara organisasi berdiri sendiri. Tugas pokok LPM adalah (1) menyusun rencana pembangunan yang partisipatif, (2) menggerakkan swadaya gotongroyong masyarakat, (3) melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Berkaitan dengan tugas yang diembannya, LPM mempunyai fungsi: (1) penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat desa dan kelurahan, (2) pengkoordinasian perencanaan pembangunan, (3) pengkoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan, (4) perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu, (5) penggalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di desa dan kelurahan. Hubungan kerja LPM dengan lembaga lainnya, yaitu (a) LPM bersama Lurah/kelurahan dalam menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan. Lurah/kelurahan bersama LPM dalam menggerakkan serta meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan dan menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat, (b) LPM dan BPD mempunyai hubungan tidak langsung, dimana rencana pembangunan hasil musyawarah LPM diajukan kepada BPD oleh Lurah untuk mendapatkan permufakatan, (c) LPM mengkoordinasikan dan memadukan usulan rencana yang disampaikan oleh Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) untuk dimusyawarahkan dalam rapat LPM, sedangkan dalam

pelaksanaannya LPM bersama RT/RW menggerakkan peran serta masyarakat.

Sesuai dengan Keputusan Presiden No. 49 Tahun 2001, misi utama pembentukan LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa di bidang pembangunan. Keberadaan organisasi LPM akan dirasakan oleh masyarakat apabila, pengurus LPM dapat melaksanakan tugas pokoknya sehingga memberikan manfaat nyata bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Adapun yang menjadi tugas pokok LPM adalah (1) menyusun rencana pembangunan yang partisipatif, (2) menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat, (3) melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Untuk dapat melaksanakan peran sesuai dengan tugas pokoknya, tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor internal yang terdapat dalam organisasi LPM sendiri maupun faktor eksternal yang terdapat di luar organisasi LPM. Faktor internal yang diduga mempengaruhi kinerja LPM terdiri dari pendidikan, keterampilan, motivasi dan persepsi pengurus LPM sendiri. Sedangkan faktor eksternalnya adalah penemuan masyarakat terhadap lembaga LPM. Penerimaan masyarakat yang dimaksudkan adalah sejauhmana masyarakat memanfaatkan keberadaan lembaga ini. Faktor-faktor tersebut merupakan sebagian dari banyaknya faktor yang mempengaruhi kemampuan pengurus LPM dalam melaksanakan perannya. dalam kajian ini diteliti faktor-faktor yang telah diuraikan tersebut. Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang mempengaruhi kinerja LPM tersebut, diperlukan suatu program untuk meningkatkan kinerja

LPM yang disusun secara partisipatif oleh stakeholder di tingkat desa, kecamatan maupun Kabupaten/Kota.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam penelitian ini adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang telah dibentuk di Kelurahan Paal Dua, dalam menjalankan tugas, dan fungsinya sesuai dengan program kerja yang telah disusun, serta hasil maupun manfaat yang diperoleh untuk kepentingan masyarakat yang ada di Kelurahan Paal Dua.

Agus Suryono memberikan definisi pembangunan bahwa pembangunan seharusnya merupakan suatu proses yang saling terkait antara proses pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial, dan demokrasi politik yang terjadi dalam lingkaran sebab akibat kumulatif (circular cumulative caution). Pembangunan sudah menjadi kata kunci bagi segala hal. Secara umum, kata pembangunan diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warga negaranya (Budiman, 1995:1). Menurut Suroto, pembangunan adalah usaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Guna penetapan tujuan dan sasaran pembangunan pada tiap tahap, untuk alokasi sumber-sumber serta untuk mengatasi rintangan keterbatasan dan pertentangan ini dan untuk melakukan koordinasi kegiatan, diperlukan kebijaksanaan yang memuat program dan cara-cara yang relevan dan efektif yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembangunan. Dengan kata lain, kebijaksanaan berisi tujuan keseluruhan dan tujuan tiap program yang hendak dicapai pada tiap tahap pembangunan, cara yang diperlukan dilakukan untuk mengatasi semua atau berbagai keterbatasan, rintangan-rintangan dan pertentangan yang ada atau diperkirakan akan terjadi, cara mengalokasikan sumber-sumber

pembangunan yang optimal, serta cara melakukan koordinasi semua kegiatan yang efektif. (Suroto, 1983:78). Pembangunan sebagai suatu peningkatan kapasitas untuk mempengaruhi masa depan mempunyai beberapa implikasi tertentu. Pertama, berarti memberikan perhatian terhadap kapasitas, terhadap apa yang diperlukan dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dan tenaga guna membuat perubahan. Kedua, ia mencakup keadilan (equity), perhatian yang berat sebelah kepada kelompok tertentu akan memecah belah masyarakat dan mengurangi kapasitasnya. Ketiga, penumbuhan kuasa dan wewenang, dalam pengertian bahwa hanya jika masyarakat mempunyai kuasa dan wewenang manfaat tertentu maka mereka akan menerima manfaat pembangunan. Dan pada akhirnya pembangunan berarti perhatian yang sungguh-sungguh terhadap saling ketergantungan di dunia serta perlunya menjamin bahwa masa depan dapat ditunjang kelangsungannya. (Ketaren, 2008:37).

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Kualitatif, yaitu memberikan gambaran mengenai data hasil penelitian yang menggunakan jenis data penelitian Kualitatif, yang dilaksanakan di Kelurahan Paal Dua. Penelitian ini di fokuskan pada peran LPM dalam pembangunan yang dikaji melalui kemampuan pengurus LPM sesuai dengan fungsi LPM itu sendiri yaitu: peran LPM dalam perencanaan pembangunan, peran menggerakkan partisipasi masyarakat, kemampuan mengevaluasi kegiatan pembangunan. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah: pengurus LPM Kelurahan Paal Dua, Lurah dan

Perangkat Kelurahan, tokoh masyarakat.

Hasil Penelitian

Fokus penelitian ini adalah peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Paal Dua sesuai tugas dan fungsinya, yaitu: menyusun rencana pembangunan yang partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Informan dalam penelitian ini adalah mereka pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Paal Dua, pemerintah kelurahan, dan masyarakat yang bersedia untuk diwawancarai. Sesuai dengan pengamatan peneliti pada waktu sebelumnya, pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Paal Dua sebanyak 39. orang pengurus, yang terdiri dari 4 orang pengurus inti, dan 5 Bidang. Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Paal Dua diambil dari masing-masing Lingkungan yang ada di Kelurahan Paal Dua, serta turut juga melibatkan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama yang ada. Untuk mengetahui peran LPM dan kendala-kendala dalam memaksimalkan peran LPM, telah dilaksanakan wawancara dan diskusi dengan berbagai stakeholder. Peran LPM dalam pembangunan masyarakat, dapat dilihat dari tiga komponen, yaitu: perencanaan pembangunan, kemampuan menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat, kemampuan melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Kelurahan Paal Dua.

Pengkajian untuk mengetahui peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan adalah kemampuan dalam merencanakan pembangunan, dapat dijelaskan bahwa keterlibatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam proses

perencanaan program, hanya terlihat pada proses perencanaan program penguatan kelembagaan tingkat Kelurahan. Keterlibatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan lebih pada bentuk keikutsertaan dalam setiap pertemuan yang diadakan untuk membahas rencana kegiatan, sedangkan dalam bentuk penyampaian gagasan, dan pikiran lebih didominasi oleh pemerintah Kelurahan. Keterlibatan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan juga tidak terlepas dari kedudukan organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai penanggung jawab operasional pelaksanaan kegiatan. Sebaliknya, pada program pembangunan yang ada di kelurahan Paal Dua peran dan keterlibatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan tidak nampak, tidak adanya inisiatif untuk menyusun proposal rencana pembangunan sarana yang diusulkan kepada Pemerintah Kota Manado yang berasal dari Kelurahan, penyusunan rencana kegiatan langsung dilaksanakan oleh masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah, tokoh masyarakat dan masyarakat yang ada tanpa ada peran dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Penyusunan rencana kegiatan program pembangunan dilakukan langsung oleh masyarakat dan kepala lingkungan yang disesuaikan dengan pedoman umum yang ada, untuk membantu masyarakat dalam menyusun rencana kegiatan.

Sebagai lembaga yang menjadi mitra pemerintah kelurahan dalam pembangunan, sebenarnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Paal Dua dapat berperan dalam proses perencanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di kelurahan. Sesuai dengan tugas pokoknya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Paal Dua dapat memberikan masukan-

masukannya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan program maupun terlibat langsung dalam penyusunan program, baik yang berasal dari pemerintah maupun yang merupakan swadaya murni masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dapat ditemukan informasi bahwa kelemahan-kelemahan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Paal Dua sehingga belum optimal melakukan perannya paling dominan dipengaruhi oleh motivasi pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Paal Dua itu sendiri yang berhubungan dengan keinginan memberi diri bekerja sebagai pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Paal Dua, begitu pula dari hal pengalaman berorganisasi, dan masalah klasik lainnya yaitu tidak tersedianya dana untuk operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Paal Dua.

Dengan dasar itulah, sesuai dengan hasil evaluasi peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Paal Dua, untuk meningkatkan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Paal Dua penulis mencoba mengajak elemen-elemen dalam masyarakat untuk mencari penyebab mengapa peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Paal Dua rendah dan memikirkan bagaimana alternatif pemecahannya serta membuat rancangan program atau kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Paal Dua. Dalam penelitian ini sesuai dengan prinsip pengembangan masyarakat, mengutamakan partisipasi dari bawah, bersama-sama dengan elemen-elemen masyarakat mengembangkan kesadaran atas potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat khususnya dalam peningkatan kinerja Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Paal Dua. Untuk mewujudkan hal ini, maka pola pengembangan masyarakat yang digunakan adalah metode partisipatif, karena partisipasi merupakan salah satu alternatif yang diutamakan dalam pengembangan masyarakat. Dengan menggunakan metode partisipatif, terdapat tiga tahapan penting yang digunakan dalam menyusun program peningkatan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Paal Dua, dimana pada setiap tahapan tersebut yang berperan sebagai aktor utama adalah masyarakat, tokoh masyarakat, pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Paal Dua, serta pemerintah Kelurahan dan pemerintah kecamatan. Tahapan-tahapan kegiatan yang dilaksanakan adalah:

a. Identifikasi Potensi, Masalah dan kebutuhan Masyarakat

Potensi masyarakat adalah segala sesuatu yang dimiliki masyarakat yang dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang berkembang dan waktu ke waktu dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya. Sehubungan dengan pelaksanaan kajian ini, penggalian informasi mengenai potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dilakukan melalui pendekatan observasi lapangan, wawancara dan diskusi, dan petikan wawancara dan diskusi serta observasi lapangan yang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian ini, dapat dikenali adanya potensi yang dimiliki oleh masyarakat yang dapat dimanfaatkan sehubungan dengan peningkatan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Paal Dua di lokasi penelitian, antara lain:

1. Faktor sosial budaya masyarakat yang gemar bergotong-royong untuk

membantu sesama warga yang membutuhkan.

2. Adanya kepatuhan masyarakat kepada tokoh formal maupun informal.
3. Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Paal Dua dilahirkan melalui suatu proses yang sangat demokratis, karena dipilih oleh masyarakat secara langsung.
4. Secara yuridis formal, keberadaan lembaga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Paal Dua mempunyai landasan yang cukup kuat karena diatur dalam Keputusan presiden dan peraturan daerah.

Adanya kemauan masyarakat untuk meningkatkan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Paal Dua. Kemauan dalam hal ini adalah adanya keinginan baik dari masyarakat, tokoh masyarakat maupun dari pemerintah agar Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Paal Dua lebih berperan dalam kegiatan pengembangan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh, antara lain; (1) tingkat pendidikan yang dimiliki oleh pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Paal Dua rendah khususnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya. Dari segi pendidikan non formal, jumlah pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Paal Dua yang telah mengikuti pelatihan. Kondisi ini menyebabkan para anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Paal Dua belum sepenuhnya dapat memahami fungsi dan tugas pokoknya sebagai organisasi kemasyarakatan yang berperan sebagai perencana, pelaksana dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Kelurahan, (2) pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Paal Dua belum memiliki pengalaman dalam menyusun rencana maupun melaksanakan kegiatan

pembangunan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Individu-individu yang menjadi pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Paal Dua pada umumnya belum pernah menjadi pengurus dalam suatu organisasi. Sehingga belum memiliki keterampilan dan pengalaman berorganisasi, (3) kurangnya motivasi anggota yang menyebabkan kurangnya kepedulian atau partisipasi dalam aktifitas. Hal ini antara lain disebabkan oleh keadaan awal dalam diri pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Paal Dua sangat berpengaruh terhadap kesediaannya berpartisipasi dalam proses belajar-mengajar dalam wadah organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Paal Dua sebagai wahana proses pembelajaran masyarakat dan imbalan yang diperoleh oleh pengurus berkaitan dengan keterlibatannya dalam kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, (4) persepsi pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan terhadap organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dipengaruhi oleh faktor-faktor dari dalam diri individu seperti pengalaman dan pengetahuan. Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan mempunyai persepsi bahwa keberadaan lembaga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sama seperti pada masa lalu, dimana keberadaan lembaga-lembaga lokal hanya membantu tugas-tugas Lurah. Dengan persepsi ini, menyebabkan aktifitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sangat tergantung pada inisiatif Lurah.

Pada tahap-tahap awal setelah memperoleh pengetahuan dan keterampilan praktis, masih diperlukan kegiatan pendampingan terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Kelurahan. Kegiatan pendampingan dilaksanakan dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi potensi dan permasalahan dalam rangka pengembangan masyarakat.
2. Teknik menggali swadaya gotong-royong masyarakat dalam mendukung program pengembangan masyarakat.
3. Menghimpun aspirasi masyarakat untuk penyusunan program pengembangan masyarakat.
4. Memfasilitasi program pengembangan masyarakat yang melibatkan berbagai pihak.
5. Pengendalian pelaksanaan program pengembangan masyarakat

Kegiatan pendampingan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat ganda. Disatu sisi pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dapat mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama pelatihan dan di sisi lain akan terjadi sosialisasi fungsi dan tugas pokok Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan baik kepada pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan maupun kepada masyarakat. Dengan tersosialisasinya fungsi dan tugas pokok Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan kepada masyarakat, diharapkan akan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk memfungsikan lembaga ini untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat khususnya yang berkaitan dengan pengembangan masyarakat. Pendampingan dilaksanakan oleh pendamping yang dapat berasal dari instansi pemerintah maupun dari luar instansi pemerintah yang mempunyai kompetensi dengan bidang tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan seperti LSM. Untuk memberikan hasil yang maksimal,

kegiatan pendampingan dilaksanakan selama satu tahun. Dengan demikian mekanisme pelaksanaan program pengembangan masyarakat mulai dari proses perencanaan sampai pada tahap evaluasi program dapat difasilitasi secara baik. Dana untuk kegiatan ini berasal dari stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan. Pendekatan pelaksanaan program dilaksanakan dalam satu wilayah dalam hal ini wilayah Kecamatan Paal Dua, selanjutnya jika hambatan dan peluang penerapan program telah dapat diidentifikasi, maka program serupa dapat diterapkan dan dipublikasikan ke Kelurahan lainnya dalam lingkup yang lebih luas yaitu tingkat kota bahkan Provinsi yang mempunyai permasalahan dan kondisi yang sama. Dalam pelaksanaan kegiatan melibatkan berbagai stakeholder yang memiliki kepentingan tertentu terhadap peningkatan peran LPM termasuk masyarakat. Stakeholder yang diharapkan terlibat adalah stakeholder tingkat lokal (Kelurahan), kecamatan maupun tingkat kota. Dalam konteks pengembangan masyarakat, tahap awal yang dilaksanakan adalah memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat tentang perlunya peningkatan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Hal ini dilakukan dengan cara partisipatori, masyarakat diberikan informasi yang tepat tentang manfaat meningkatkan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan cara peningkatan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan itu sendiri. Dengan cara ini, masyarakat diharapkan akan mempunyai komitmen, kepercayaan dan dukungan kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Paal Dua belum optimal berperan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan, hal ini dapat dinilai dari rendahnya kemampuan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Paal Dua dalam merencanakan pembangunan, kemampuan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat, dan kemampuan untuk melaksanakan, mengevaluasi kegiatan pembangunan yang ada di Kelurahan.
2. Rendahnya peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Paal Dua ini disebabkan oleh: keaktifan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Paal Dua itu sendiri, dimana ada beberapa pengurus yang sudah tidak lagi berdomisili di Kelurahan Paal Dua, ditambah dengan rendahnya pengetahuan, keterampilan, keahlian sesuai dengan pekerjaan yang diembannya, motivasi pengurus, serta permasalahan klasik yaitu tidak tersedianya dana operasional bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Paal Dua.

Saran

1. Untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan rendahnya peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Paal Dua, maka diperlukan program peningkatan kualitas sumberdaya manusia pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Paal Dua dalam bentuk pelatihan dengan orientasi tugas

pokok dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Paal Dua yang dilakukan oleh Pemerintah Kota maupun pemerintah kecamatan agar setiap pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Paal Dua memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam melaksanakan tugasnya, dalam bentuk pendampingan.

2. Perlunya keterlibatan berbagai stakeholder pada berbagai level, baik ditingkat kelurahan, kecamatan maupun kota dalam program yang akan dilaksanakan, diharapkan akan dapat memberikan motivasi, meningkatkan pengetahuan dan pengalaman serta mengubah persepsi pengurus sehingga dapat lebih berperan dalam kegiatan pengembangan pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat lebih memanfaatkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Paal Dua dalam setiap pembangunan yang dibutuhkan di kelurahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Rukminto, I. 2003. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas, Pengantar pada pemikiran dan Pendekatan Praktis*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Budiman, Arif. 1995. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: PT. Gramedia Pusataka Utama
- Gibson, Ivancevich dan Donely. 1994. *Organisasi dan Manajemen*. Erlangga. Jakarta.
- Gunardi & Sarwititi Sarwoprasodjo. 2003. *Pengantar Pengembangan Masyarakat* Institut Pertanian Bogor.
- Hasibuan Malayu, S.P. 1999. *Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktifitas*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Khairuddin, H. 1992. *Pembangunan Masyarakat, Tinjauan Aspek Sosiologi, Ekonomi dan Perencanaan*. Penerbit Liberty. Yogyakarta.
- Ketaren, Nurlela. 2008. *Aministrasi Pembangunan, USU: Word Press*
- Moleong, Lexi J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Ramaja Rosdakarya.
- Mubyarto, dkk. 1994. *Keswadayaan Mayarakat Desa Tertinggal. P3PK UGM*. Aditya Media. Yogyakarta.
- Narwoko, Dwi dan Bagong Suyanto. 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan erapan*. Jakarta: Prenada Media.
- Soekanto. 2003. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tonny, Fredian & S.Oetomo, Bambang. 2003. *Pengembangan Kelembagaan dan Modal Sosial, Modul SEP-51C*. Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi. Fakultas Pertanian IPB dan Program Pasca Sarjana IPB.
- Suroto. 1983. *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Tenaga Kerja*, Yogyakarta: Gajamadah University.
- Simanjuntak, P.J. 1985. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta. Lembaga Penerbit FE UI.
- Syaukat, Yusman dan Hendrakusumaatmadja, Sutara. 2002. *Pengembangan Ekonomi Berbasis Lokal*.
- Winkel W.S. 1994. *Psikologi Pengajaran*. Penerbit PT. Gramedia. Jakarta.